

**Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan Di SMA Negeri 10 Yogyakarta
Oleh: Safitri Yosita Ratri, M.Pd dan Lia Yuliana, M.Pd**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMA Negeri 10 Yogyakarta terutama mengenai, (1) efektivitas sosialisasi KTSP yang dilakukan oleh kepala sekolah, (2) kemampuan guru dalam melaksanakan KTSP, dan efektivitas kepala sekolah dalam memantau pelaksanaan KTSP.

Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi, yakni evaluasi terhadap implementasi KTSP di SMA Negeri 10 Yogyakarta yang dituangkan secara deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah semua pihak yang terkait, terutama kepala sekolah dan guru. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) display data, dan (4) kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah masih rendah. Hal ini dikarenakan pelaksanaan sosialisasi yang terlalu cepat sehingga mengakibatkan kurang tersosialisasinya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kurangnya sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ini berpengaruh pada kurangnya pemahaman beberapa orang guru mengenai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. (2) Kemampuan guru dalam melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari silabus dan RPP yang dibuat sudah sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Depdiknas. Selain itu di dalam pelaksanaan silabus dan RPP, guru sudah berusaha untuk menyesuaikan dengan yang direncanakan. (3) Efektivitas Kepala Sekolah dalam memantau pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, masih rendah. Hal ini sebagai akibat kurang pahamannya Kepala Sekolah mengenai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kepala Sekolah tidak memperoleh pendidikan dan latihan khusus Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan tidak ikut sebagai peserta dalam Bimbingan teknis yang diadakan oleh LPMP.

Kata Kunci: *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Implementasi*

Pendahuluan

Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia yang sangat penting dan urgen dalam Pembangunan Nasional dan dapat mendukung tercapainya target-target Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional memerlukan kualitas sumber daya manusia yang unggul, baik dalam kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, seni, keterampilan, olah raga maupun sikap mental. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan dan harus diperhatikan serta dikelola dengan pemanfaatan secara efektif dan efisien.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari delapan standar pendidikan nasional tersebut yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Kurikulum merupakan sub sistem dari sistem pendidikan Nasional yang otomatis diimplementasikan tidak efektif dengan sendirinya meskipun rumusannya telah diimplementasikan optimal. Kurikulum memerlukan perangkat sub sistem lainnya untuk dapat bergerak di dalam rangkaian kegiatan mencapai tujuan pendidikan itu sendiri.

Penyempurnaan kurikulum dilakukan guna mewujudkan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan juga sebagai respon terhadap tuntutan perkembangan informasi, ilmu, teknologi, seni, tuntutan desentralisasi, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu,

bahan kajian yang harus dikuasai oleh siswa harus disesuaikan dengan tuntutan tersebut. Selain bahan kajian yang harus dikuasai oleh semua siswa, kompetensi juga perlu digali, diseleksi dan diolah sesuai dengan bahan kajian, apalagi siswa harus memiliki kompetensi agar mereka dapat mengikuti perkembangan zaman yang semakin pesat (Depdiknas, 2004:3).

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 10 Yogyakarta telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu keberhasilan dilihat dari kegiatan belajar mampu membentuk pola tingkah laku peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan, serta dapat dievaluasi melalui pengukuran dengan menggunakan tes dan non tes. Proses pembelajaran akan efektif apabila dilakukan melalui persiapan yang cukup dan terencana dengan baik supaya dapat diterima untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi perkembangan dunia global dan sebagai proses untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Berkenaan dengan diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, maka diperlukan adanya sosialisasi kepada berbagai pihak agar kurikulum baru yang ditawarkan tersebut dapat dipahami dan diterapkan secara optimal, sebagaimana disebutkan oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa sosialisasi merupakan langkah penting yang akan menunjang dan menentukan keberhasilan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Melalui kegiatan sosialisasi selain untuk memperoleh berbagai masukan atau saran yang dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan dalam dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

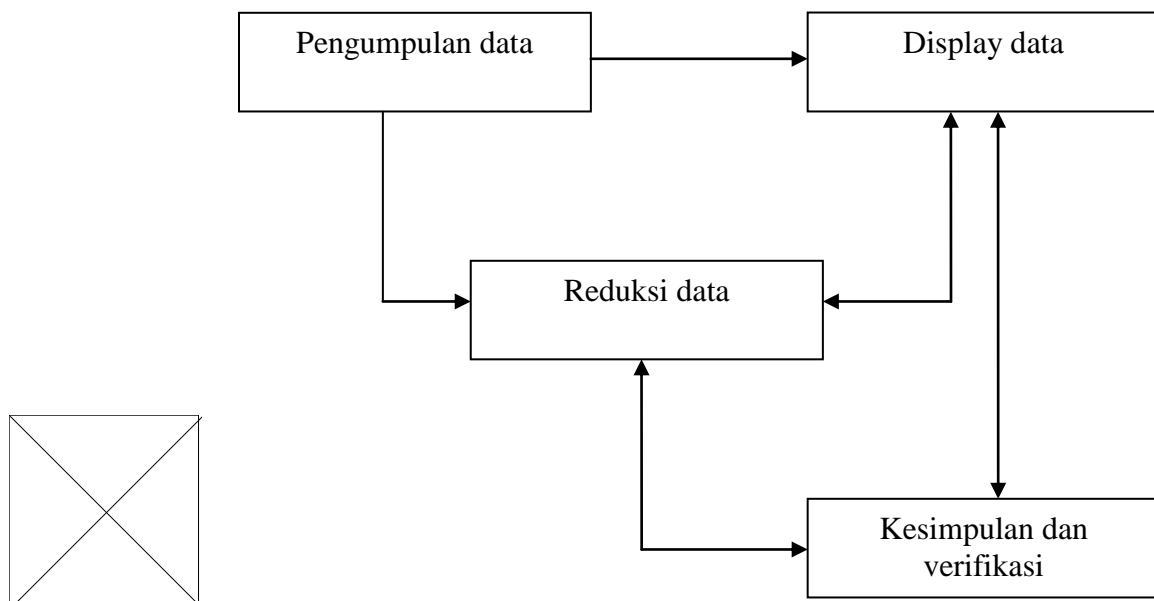
Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka penelitian ini mengenai bagaimana implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA Negeri 10 Yogyakarta yang telah melaksanakan secara terbatas Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mulai tahun pelajaran 2006 – 2009 yang sampai saat ini belum pernah diadakan studi evaluasi implementasinya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1). Seberapa tinggi efektivitas sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah? 2). Seberapa tinggi kemampuan guru dalam melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan? 3). Seberapa efektif Kepala Sekolah dalam memantau pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan?

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 10 Yogyakarta yang telah melakukan implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Pertimbangan pemilihan SMA Negeri 10 Yogyakarta sebagai tempat penelitian, selain didasarkan karena SMA Negeri 10 Yogyakarta merupakan salah satu sekolah, alasan waktu, letak geografis dan sumber yang tersedia, juga didasarkan pada kebijakan program implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang telah dimulai pada tahun ajaran 2006-2009. Waktu pelaksanaan penelitian sudah dimulai pada bulan Januari 2009, yaitu melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kepala sekolah dan guru dalam implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Selanjutnya, pada bulan Mei 2010 sampai Agustus 2010, peneliti terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi, yakni evaluasi terhadap implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA Negeri 10 Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan gambaran secara menyeluruh, akurat dan objektif tentang hasil implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA Negeri 10 Yogyakarta. Subjek dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA Negeri 10 Yogyakarta, di antaranya adalah kepala sekolah dan guru. Teknik Pengumpulan Data yaitu wawancara (*interview*), pengamatan (*observasi*), dokumentasi. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman (1984) yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) display data, dan (4) mengambil kesimpulan dan verifikasi. Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Proses analisis data kualitatif

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai Evaluasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA Negeri 10 Yogyakarta yang berhasil dihimpun akan dipaparkan sebagai berikut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang telah dilaksanakan mulai tahun ajaran 2006/2007, dan sampai sekarang belum dilakukan evaluasi. Namun penulis tidak mengevaluasi keseluruhan kegiatan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tersebut dikarenakan keterbatasan dana dan waktu. Selain itu untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA Negeri 10 Yogyakarta. Data yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berhasil dihimpun dari kepala sekolah dan para guru.

Secara lengkap penyajian data meliputi aspek: (1) Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Yogyakarta, (2) Kemampuan guru dalam melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (3) Pemantauan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Yogyakarta.

1. Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah

Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dimulai sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan 23 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan yang ditandatangani pada 2 Juni 2006. Penandatanganan ini bertepatan pada tahun ajaran 2006/2007 sesuai dengan ketentuan tersebut maka Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan harus diterapkan mulai tahun ajaran 2006/2007.

Menindaklanjuti hal tersebut maka dikeluarkan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 421 Tahun 2006 mengenai Implementasi Permendiknas Nomor 22, 23 dan 24. Setelah menerima surat edaran tersebut maka, mulai tahun ajaran 2006/2007 SMA Negeri 10 Yogyakarta dengan segera menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sebagai pengembangan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi. Alasan yang melatarbelakangi SMA Negeri 10 Yogyakarta menerapkan KTSP ini karena KTSP ini merupakan kelanjutan atau penyempurnaan dari KBK. Maka sebagai sekolah yang telah menerapkan KBK sebelumnya, maka setelah adanya intruksi dari Dinas Pendidikan Propinsi DIY yang mengisyaratkan agar sekolah-sekolah yang telah menerapkan KBK agar segera beralih

ke KTSP. Selain itu mengingat bahwa SMA Negeri 10 Yogyakarta ini merupakan salah satu sekolah andalan yang ada di Kabupaten Sleman.

Berkaitan dengan hal tersebut dibutuhkan suatu kegiatan sosialisasi yang harus dilakukan oleh sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah sebagai pucuk pimpinan yang ada di SMA Negeri 10 Yogyakarta. Oleh karena itu diadakanlah pertemuan seluruh Kepala Sekolah se-Kabupaten Sleman untuk membahas dan mendapat sosialisasi dari para ahli dan mendiskusikan bersama untuk mendapatkan jalan yang baik dalam menerapkan Kurikulum tersebut di sekolahnya masing-masing. Namun yang sangat disayangkan adalah tidak adanya pendidikan dan latihan khusus kepala sekolah mengenai pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ini. Sesuai yang dikatakan oleh Kepala Sekolah; "Saya tidak pernah mendapatkan diklat khusus tentang KTSP, saya hanya mendapatkan sosialisasi *bareng* kepala sekolah se-Kabupaten Sleman, mas!"

Selain kegiatan diatas SMA Negeri 10 Yogyakarta mengadakan kegiatan *In House Training (IHT)* dan *workhsop* mengenai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dengan mendatangkan narasumber dari Dinas Pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Sedangkan Kepala Sekolah hanya sebagai pembuka dan ikut sebagai peserta. Seperti yang diungkapkan oleh AJ; "Bapak cuma jadi pembuka IHT aja mas, dan ikut jadi peserta juga" .Kegiatan *In House Training* dan *workshop* ini berlangsung selama dua hari yang bertempat di salah satu Wisma di Wilayah Kaliurang, Sleman dengan para peserta yaitu kepala sekolah dan seluruh guru. Namun hari dan tanggal pelaksanaan yang tepat penulis tidak mendapatkan detailnya, mengingat kegiatan tersebut telah berlangsung kurang lebih dua tahun yang lalu dan pada saat itu sistem pengarsipan setiap kegiatan di SMA Negeri 10 Yogyakarta belum sebagus pada masa sekarang. Seperti yang diungkapkan oleh Sdj; "Untuk tanggalnya udah lupa,tapi diselenggarakanya di Kaliurang, mas. Dulu tidak bikin laporan seperti sekarang. Coba tanya Pak Slamet, kalau mau tanya tanggalnya" Akan tetapi untuk materi yang diberikan pada saat kegiatan *In House Training* dan *Workshop* ini, penulis berhasil mendapatkan dari dokumen yang diberikan oleh mantan Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum yang pada saat sosialisasi tersebut beliau masih menjabat.

Materi pertama yang diberikan tentunya pengenalan mengenai apa itu KTSP mulai dari pengertian KTSP itu sendiri, landasan pelaksanaan, bagaimana pengembembangan kurikulum tersebut beserta pedoman dan prinsip pengembangan KTSP. Selain itu ada yang paling penting yaitu mengenai komponen KTSP yang terdiri

dari Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan, Struktur dan Muatan KTSP, Kalender Pendidikan, Silabus dan yang terakhir adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Setelah pengenalan awal mengenai KTSP melalui kegiatan *In House Training* selesai langsung dilanjutkan ke sesi *workshop*. Inti dari kegiatan *workshop* itu sendiri adalah memberikan sosialisasi dari pelaksanaan perangkat mengajar yang tentunya sesuai dengan pedoman KTSP yang telah diaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Kepala sekolah dan para guru kemudian di berikan format penyusunan KTSP dan format penyusunan silabus juga Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk diujicobakan penyusunannya dan mendiskusikan dengan narasumber bagaimana penyusunan yang baik. Sehingga apabila ada guru yang belum paham bisa dapat langsung mendapatkan jawaban dari sumber yang dapat dipercaya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa guru menerima sosialisasi melalui *In House Training* dan *workshop* saja sedangkan waktunya hanya dua hari saja. Walaupun ada guru yang mendapatkan diklat khusus pelaksanaan KTSP yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Nasional dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Sehingga ada sejumlah guru yang belum begitu paham mengenai KTSP.

Setelah proses sosialisasi ini selesai para guru dituntut untuk segera menyusun silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dari hasil wawancara dengan beberapa guru peran kepala sekolah dalam hal ini hanya sebagai motivator saja.

2. Kemampuan guru dalam melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Penyusunan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan tuntutan pertama yang harus dilaksanakan oleh guru dalam Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMA Negeri 10 Yogyakarta.

Silabus adalah ikhtisar keseluruhan program pengajaran yang terdiri dari tujuan program kurikuler, tujuan pembelajaran perkelas, tujuan pembelajaran pokok bahasan dan ruang lingkup materi pembelajaran yang diatur dan disusun secara berurutan menurut semester dan kelas, yang berfungsi sebagai pedoman bagi pengawas, kepala sekolah dan guru dalam rangka melaksanakan program belajar mengajar di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka setiap guru bidang studi dituntut untuk membuat silabus, sehingga dalam proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang ada dalam silabus tersebut.

Dalam penyusunan silabus dan RPP ini sebenarnya para guru diberikan waktu tiga bulan untuk menyelesaikannya. Hal ini dikarenakan SMA Negeri 10 Yogyakarta, langsung menerapkan KTSP ini tanpa adanya ujicoba terlebih dahulu, seperti pada saat pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Namun pada kenyataan waktu tiga bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh para guru, dikarenakan banyak kendala. Di dalam penyusunan silabus dan RPP oleh guru merupakan yang paling ditemui kendala dalam pelaksanaan KTSP. Kendala yang paling utama berasal dari guru itu sendiri yaitu rasa malas. Sesuai yang dikemukakan oleh SJS; “Kendalanya rasa malas, Mas! Soalnya kita sudah capek mengajar, masih harus menyusun silabus dan RPP”. Rasa malas yang membuat proses penyusunan silabus dan RPP menjadi lama. Rasa malas ini dipicu banyaknya tugas yang harus diselesaikan guru masih harus menyusun silabus dan RPP. Selain itu kurangnya pemahaman guru mengenai silabus dan RPP karena hal ini merupakan hal yang baru dan sudah terbiasa dengan sistem yang lama. Kurangnya sarana prasana juga menjadi salah satu kendala. Tidak semua guru mempunyai laptop atau komputer pribadi. Sehingga untuk mengetik dan mencetak silabus dan RPP dilakukan di sekolah. Berhubung terbatasnya komputer yang dimiliki oleh sekolah, membuat guru menggunakannya secara bergantian.

Untuk melihat kesesuaian silabus dan RPP yang dibuat oleh para guru di SMA Negeri 10 Yogyakarta peneliti mencocokkan dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Mengingat keterbatasan waktu, penulis hanya mengambil satu buah contoh silabus dan RPP. Silabus dan RPP yang digunakan untuk melihat kesesuaian ini adalah silabus dan RPP mata pelajaran Kimia untuk kelas X yang diampu oleh Djoko Marsono. Dalam komponen identifikasi silabus sudah sesuai dengan panduan umum pengembangan silabus. Namun dalam alokasi waktu disebutkan jumlah menit yang dibutuhkan dalam setiap satu jam pelajaran. Antara Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar sudah ada keterkaitan. Materi pembelajaran sudah mempertimbangkan potensi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran disusun untuk memudahkan guru dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal harus mengandung dua unsur yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar peserta didik, yaitu peserta didik dan materi terpenuhi dengan adanya kegiatan mengkaji materi yang diberikan melalui kegiatan kerja kelompok dan mempresentasikannya di depan kelas. Indikator sebagai penanda ketercapaian Kompetensi Dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku peserta

didik telah dapat diukur mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sudah terumuskan pada indikator yang dicantumkan dalam silabus. Jenis penilaian tidak ditemui masalah. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus hendaknya ditulis dengan lengkap, sehingga tidak menimbulkan kerancuan. Sumber bahan dan alat hendaknya mencantumkan sumber buku, yaitu nama penerbit, nama pengarang dan tahun pembuatan, sehingga memudahkan para peserta didik dalam memudahkan mencari sumber yang dijadikan acuan.

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tidak boleh terlepas dari Silabus. RPP dan silabus harus ada kesesuaian yang tidak dapat dipisahkan. Di dalam mencantumkan identitas RPP sudah sama dengan yang ada di silabus, hanya saja di dalam indikator terdapat satu buah indikator yang ada dalam silabus belum tercantum dalam RPP. Tujuan pembelajaran yang tercantum dalam RPP tidak sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang ada dalam silabus. Apabila kegiatan pembelajaran dilakukan lebih dari satu pertemuan ada baiknya tujuan pembelajaran dibedakan menurut waktu pertemuan sehingga setiap pertemuan dapat memberikan hasil. Materi pembelajaran sudah sesuai dengan silabus. Dalam metode pembelajaran sudah mencantumkan pendekatan pembelajaran dan metode. Untuk mencari suatu Kompetensi Dasar harus mencantumkan langkah-langkah kegiatan setiap pertemuan. Oleh karena itu terdapat langkah-langkah minimal yang harus dipenuhi pada setiap unsur kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan harus memusatkan pada perhatian peserta didik pada materi yang akan dibelajarkan, memberi persepsi awal, motivasi, acuan dan penjelasan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar. Kegiatan inti berisi langkah sistematis yang dilalui peserta didik untuk mengkonstruksikan ilmu sesuai dengan kemampuannya. Kegiatan penutup lebih kepada guru dalam mengarahkan peserta didik untuk menyimpulkan setiap materi, melakukan test hasil belajar dan pengarahannya tindak lanjut. Dari langkah-langkah minimal yang harus dipenuhi tersebut, guru sudah menuangkannya dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran meskipun kegiatan pendahuluan, inti dan kegiatan penutup tidak harus ada dalam setiap pertemuan.

Pelaksanaan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran untuk masing-masing guru berbeda-beda dan tidak dapat dilaksanakan 100% persis sesuai dengan yang dilaksanakan. Namun guru berusaha untuk sesuai dengan yang telah tertuang dalam silabus dan RPP. Terkadang guru menggeser urutan Silabus dan RPP. Banyak sebab yang melatarbelakangi ketidaksesuai pelaksanaan silabus dan RPP ini, seperti

yang diutarakan oleh guru mata pelajaran penjas kes KW; “Dalam RPP direncanakan untuk pertemuan kedua materi yang diberikan adalah permainan bola basket, berhubung hujan mengguyur kemudian pelajaran dialihkan ke aula dengan permainan senam”. Khusus untuk silabus dan RPP semua mata pelajaran kelas XII tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan guru harus mengulangi lagi sebagian materi kelas X dan XI dan untuk lebih mempersiapkan agar siswa kelas XII siap menghadapi ujian nasional.

Kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan guru yang mencakup kegiatan tatap muka, kegiatan pemberian tugas terstruktur kepada siswa, dan kegiatan pemberian tugas mandiri tidak terstruktur. Namun beberapa orang guru masih bingung terhadap pemberian tugas terstruktur dan tidak terstruktur. Kebingungan ini sebagai akibat kurangnya sosialisasi mengenai hal ini.

3. Pemantauan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Yogyakarta

Kegiatan utama pendidikan yang dilakukan sebagai upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh sekolah adalah kegiatan pembelajaran. Agar tujuan yang telah ditetapkan oleh sekolah tersebut tidak melenceng dari jalur yang telah disepakati, maka diperlukan peran kepala sekolah sebagai pengawas kegiatan pembelajaran tersebut.

Kegiatan monitoring (pengawasan) yang dilakukan oleh kepala sekolah merupakan kontrol agar kegiatan pendidikan di sekolah menjadi terarah pada tujuan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Kegiatan monitoring ini juga merupakan tindakan preventif untuk mencegah agar para guru tidak melakukan penyimpangan dan lebih terarah dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan oleh sekolah.

Pada saat penyusunan silabus dan RPP, setiap guru yang ada di SMA Negeri 10 Yogyakarta harus menyelesaikan silabus dan RPP tersebut dalam jangka waktu tiga bulan. Jangka waktu yang pendek tersebut dikarenakan SMA Negeri 10 Yogyakarta langsung menerapkan KTSP tanpa adanya uji coba terlebih dahulu. Untuk memenuhi target tiga bulan yang telah ditetapkan tersebut, dibutuhkan suatu pengawasan dari kepala sekolah. Mengingat fungsi kepala sekolah sebagai manajer di sekolah yang harus memiliki strategi yang bagus agar target yang ditetapkan tersebut dapat dipenuhi. Namun pada kenyataan hal tersebut hanyalah isapan jempol belaka. Seharusnya selain sebagai manajer, kepala sekolah harus menjadi inovator yang mencari cara yang tepat

untuk setiap kendala yang ditemui, sehingga tujuan sekolah dapat selesai tepat pada waktunya secara efektif dan efisien. Kepala sekolah hanya berperan sebagai motivator saja. Dalam setiap kesempatan tidak lupa selalu mengingatkan guru agar segera menyusun silabus dan RPP tersebut. Seharusnya sebagai kepala sekolah yang baik tidak hanya memotivator saja. Kepala sekolah seharusnya turun langsung bersama guru menyusun silabus dan RPP tersebut. Sehingga mengetahui setiap perkembangan yang ada atau jika ada guru yang mengalami kesulitan bisa dicarikan solusi yang tepat. Selain itu pada saat penandatanganan silabus dan RPP, kepala sekolah langsung membubuhkan tanda tangannya saja, tanpa adanya koreksi terhadap silabus dan RPP yang dibuat oleh guru. Seperti yang diutarakan oleh AJ; “Bapak tidak merevisi mbak, langsung tanda tangan. Mungkin karena kesibukan Bapak, jadinya tidak sempat dikoreksi.” Kepala sekolah harus membaca dan mengkoreksi setiap silabus dan RPP yang diajukan oleh guru. Silabus dan RPP tersebut disusun sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kepala sekolah tidak mendapatkan diklat khusus secara langsung mengenai KTSP. Pengetahuan yang diperoleh mengenai KTSP hanya diperoleh pada saat sosialisasi saja. Sehingga pengetahuan yang diperoleh kepala sekolah sangatlah terbatas. Kurangnya waktu yang dimiliki oleh kepala sekolah juga menjadi salah satu alasan, mengapa kepala sekolah tidak mengkoreksi dan merevisi silabus dan RPP yang diajukan oleh guru.

Pelaksanaan Program Belajar Mengajar tentunya harus dimonitoring oleh Kepala sekolah. Montioring PBM ini kepala sekolah sedikit diuntungkan dengan adanya Buku Kerja Guru yang disusun setiap satu semester. Buku Kerja Guru ini terdiri dari tiga macam. Buku pertama berisi tentang Standar Isi, Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Buku Kerja Satu ini merupakan hasil yang diperoleh dari penyusunan silabus dan RPP yang dibuat oleh guru.

Sementara itu, Buku Kerja Dua ini berisi Kode Etik Guru, Ikrar Guru, Kalender Pendidikan, Program Tahunan, Program Semester dan Agenda Kegiatan. Untuk program tahunan berisikan perician banyaknya minggu efektif dalam satu tahun yang telah dibagi dalam dua semester. Dari satu semester diketahui banyaknya minggu, kemudian guru memprediksikan jumlah minggu efektif dan tidak efektif. Setelah jumlah minggu efektif diketahui maka dapat diketahui pula jumlah jam pelajaran yang akan digunakan untuk acuan. Jumlah jam ini diperoleh dari jumlah minggu efektif dikalikan dengan jumlah jam setiap tatap muka. Dari hasil tersebut kemudian dirinci berapa jumlah jam yang dibutuhkan untuk tatap muka, ulangan harian, ulangan umum, remedial

dan cadangan. Program tahunan ini harus diketahui dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Setelah program tahunan selesai dibuat, kemudian guru membuat Program Semester dimana Program Semester ini merupakan penjabaran dari Program Tahunan karena program ini memuat lebih detail dengan adanya Kompetensi Dasar dan materi pokoknya yang harus diajarkan guru selama satu semester beserta waktu yang dibutuhkan. Seperti halnya Program Tahunan, Program Semester ini harus diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Agenda kegiatan atau Program Pelaksanaan Harian merupakan bagian terakhir yang ada dalam Buku Kerja Dua. Agenda Harian ini harus diisi oleh guru setiap jam pelajaran usai. Di dalam agenda harian ini berisi hari dan tanggal, kelas dan jam keberapa guru mengajar. Kemudian Kompetensi Dasar yang harus dipahami oleh peserta didik beserta indikatornya, apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar, jumlah peserta didik yang absen, hambatan yang ditemui pada saat Proses Belajar Mengajar dan diakhiri dengan keterangan. Setiap satu bulan, guru harus meminta tanda tangan kepala sekolah sehingga kepala sekolah dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan PBM setiap guru.

Buku yang terakhir adalah Buku Kerja Tiga. Buku kerja ini berisi daftar hadir siswa yang harus diisi setiap tatap muka, daftar nilai siswa yang terdiri dari nilai ulangan harian dan nilai tugas yang diberikan oleh guru. Dari keseluruhan nilai setiap ulangan harian kemudian di cari rata-ratanya. Selain mencari nilai rata-rata guru harus mencari daya serap siswa. Daya serap ini diperoleh dari jumlah anak yang mendapat nilai lebih dari atau sama dengan 6 dibagi jumlah siswa dalam kelas dikali 100%. Dalam setiap ulangan harian guru harus membuat analisis ulangan harian yang nantinya juga dimasukkan dalam Buku Kerja Tiga. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah semua siswa telah tuntas belajar. Seorang siswa dinyatakan telah tuntas belajar apabila telah mencapai skor minimal ketuntasan yang telah ditentukan oleh guru mata pelajaran dan suatu kelas dikatakan telah tuntas belajar apabila di dalam kelas tersebut mencapai minimal 85% siswa yang mencapai ketuntasan. Apabila dalam setiap ulangan terdapat peserta didik yang tidak tuntas belajar, guru harus menambah isi Buku Kerja Tiga dengan Program Pelaksanaan Perbaikan dan Pengayaan. Pada halaman terakhir buku kerja ini berisi perician daftar buku yang digunakan sebagai pegangan guru dan siswa. Buku Kerja Tiga ini juga harus diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah.

Selain dengan adanya Buku Kerja Guru, kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin setiap hari Senin

setelah upacara bendera selesai. Di dalam pertemuan rutin ini biasanya kepala sekolah bersama guru, melakukan kegiatan evaluasi apakah program yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, sehingga apabila terjadi suatu hambatan dapat dicari bersama-sama pemecahan masalah tersebut.

C. Pembahasan

Dalam bagian ini akan dibahas satu-persatu mulai dari efektivitas sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, kemampuan guru dalam melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, dan efektivitas Kepala Sekolah dalam memantau pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

1. Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Yogyakarta.

Sosialisasi merupakan salah satu komponen penting yang tidak boleh ditinggalkan setiap menerapkan suatu program yang baru. Terutama sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah kepada guru-guru, peserta didik, dan karyawan yang ada di SMA Negeri 10 Yogyakarta.

Dari berbagai wawancara yang berhasil dihimpun menunjukkan bahwa dalam upaya sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan(KTSP), Kepala Sekolah sudah melakukannya dengan baik walaupun masih ada beberapa orang guru yang masih belum paham.

Pelaksanaan sosialisasi yang terlalu cepat ini mengakibatkan kurang tersosialisasinya KTSP yang akan dilaksanakan. Sehingga akan berpengaruh pada kurangnya pemahaman guru tentang KTSP. Oleh karena itu, peran kepala sekolah sangat dibutuhkan untuk membuat guru yang belum paham tersebut menjadi lebih paham tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Namun yang sangat disayangkan, Kepala Sekolah tidak mendapatkan diklat khusus KTSP. Sehingga pemahaman beliau mengenai KTSP tersebut bisa dikatakan sama dengan pengetahuan yang dimiliki oleh guru. Seharusnya Kepala Sekolah dituntut lebih mendalami KTSP mengingat kedudukan Kepala Sekolah sebagai pucuk pimpinan tertinggi di sekolah yang dituntut kreatif dalam menentukan setiap strategi yang tepat dalam melaksanakan KTSP.

2. Kemampuan guru dalam melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Di dalam melakukan kewajibannya guru harus memiliki dan menguasai seperangkat kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab profesinya.

Hal ini dikarenakan guru merupakan ujung tombak yang menentukan tingkat keberhasilan implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Berdasarkan hasil pengamatan, hasil wawancara, dan hasil dokumentasi, dapat dikatakan bahwa kemampuan guru dalam melaksanakan KTSP sudah baik. Sejumlah guru pernah mendapatkan pelatihan khusus mengenai KTSP yang diadakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan menularkan apa yang didapat ke teman sejawat. Meskipun ada sejumlah guru yang belum begitu paham mengenai KTSP. Hal ini dapat dilihat dari silabus dan RPP yang dibuat oleh guru sudah sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Walaupun ada beberapa bagian yang masih belum sesuai sebagai akibat kekurantelitan guru. Namun ada beberapa kendala dalam proses penyusunan silabus dan RPP ini, seperti rasa malas dan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah.

Rasa malas yang muncul pada diri guru merupakan hal yang lumrah. Namun kendala tersebut jangan dijadikan kebiasaan. Harus ada motivasi dari diri sendiri atau orang lain sehingga rasa malas tersebut bisa hilang. Adanya reward khusus bagi guru yang menyelesaikan silabus dan RPP tepat pada waktunya, bisa menjadi salah satu jalan keluar yang baik untuk meningkatkan motivasi guru dalam menyelesaikan silabus dan RPP. Selain itu peran kepala sekolah atau teman sejawat juga bisa menolong meningkatkan motivasi tersebut. Kurangnya pemahaman guru bisa diatasi dengan cara guru saling berbagi informasi dengan guru dari sekolah dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Guru juga bisa mengikuti diklat khusus pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Nasional dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Terbatasnya komputer yang dimiliki di ruang guru bukanlah suatu kendala berarti. Guru bisa memanfaatkan laboratorium komputer yang dimiliki oleh SMA Negeri 10 Yogyakarta. Fasilitas tersebut bisa digunakan oleh seluruh masyarakat sekolah dan bukan dikhususkan untuk peserta didik saja.

Di dalam pelaksanaan silabus dan RPP guru sudah berusaha melaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Namun untuk guru kelas XII, tidak dapat melaksanakan seutuhnya. Hal ini dikarenakan guru harus mengulang beberapa materi kelas X dan XI. Selain itu guru lebih fokus untuk mempersiapkan peserta didik untuk siap dalam menghadapi ujian. Dengan adanya berbagai kendala seperti kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah ini guru menjadi lebih kreatif untuk

mengatasinya sehingga pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar tidak lagi mengalami hambatan.

Untuk mengatasi kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah tidak berpangku tangan saja. Sekolah sudah berusaha untuk mengatasi kendala tersebut dengan cara mengajukan beberapa proposal untuk mendapatkan sejumlah dana untuk melengkapi kekurangan sarana dan prasarana yang dimiliki. Namun kurangnya kendala ini seharusnya dapat menimbulkan kreativitas guru. Guru dituntut untuk kreatif agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung walaupun tidak ada fasilitas yang dimiliki. Sebagai contoh apabila peserta didik tidak memperoleh referensi mengenai tugas sekolahnya di perpustakaan. Peserta didik dapat mencari referensi lain dari internet yang bisa diakses gratis oleh peserta didik di ruang komputer.

Selain itu pemberian tugas terstruktur dan tidak terstruktur yang dirasa masih membingungkan sejumlah guru. Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang didesain oleh pendidik untuk menunjang pencapaian tingkat kompetensi dan atau kemampuan lainnya pada kegiatan tatap muka. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik. Penugasan terstruktur termasuk kegiatan perbaikan, pengayaan, dan percepatan. Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang didesain oleh pendidik untuk menunjang pencapaian tingkat kompetensi mata pelajaran atau lintas mata pelajaran atau kemampuan lainnya yang waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik.

Guru bisa mengakses internet untuk mencari informasi mengenai tugas terstruktur dan tugas tidak terstruktur. Di dalam internet biasanya ada suatu website khusus untuk saling berbagi informasi mengenai pendidikan dari banyak guru dari berbagai pelosok di Indonesia. Kita bisa dapat mengambil sedikit apa yang kita butuhkan kemudian disesuaikan dengan keadaan di sekolah. Selain itu forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran, juga bisa sangat membantu untuk saling bertukar pikir dan hendaknya guru yang memperoleh diklat khusus, hendaknya rela berbagi informasi berharga tersebut. Karena semua itu untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 10 Yogyakarta.

3. Pemantauan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Yogyakarta

Di dalam pelaksanaan suatu program disekolah, dibutuhkan suatu pemantauan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah. Dari hasil wawancara yang dihimpun dari sejumlah guru, dapat diketahui efektivitas Kepala Sekolah dalam pemantauan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMA Negeri 10 Yogyakarta masih sangat kurang. Hal ini sebagai akibat kurangnya pemahaman Kepala Sekolah tentang KTSP. Selain itu pada saat penandatanganan silabus dan RPP, tidak ada revisi maupun komentar dari Kepala Sekolah. Kepala Sekolah yang baik seharusnya melihat terlebih dahulu silabus dan RPP yang akan ditandatangani, sehingga apabila ada suatu kesalahan, Kepala Sekolah bisa melakukan koreksi. Kesibukan Kepala Sekolah yang tidak dapat dihindarkan menjadi salah satu penyebab, namun seyogyanya Kepala Sekolah menyediakan waktu untuk melakukan pemantauan tersebut.

Adanya Buku Kerja Guru mengakibatkan Kepala Sekolah menjadi malas untuk memantau secara langsung pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar. Beliau hanya memantau pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar dengan melihat Buku Kerja yang dibuat oleh guru saja. Sehingga Kepala Sekolah tidak bisa melakukan kroscek langsung apa yang telah ditulis guru di dalam Buku Kerja dengan kenyataan yang apa pada saat Kegiatan Belajar Mengajar.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Yogyakarta masih rendah Hal ini dikarenakan pelaksanaan sosialisasi yang terlalu cepat, sehingga mengakibatkan kurang tersosialisasinya KTSP dan berpengaruh pada kurangnya pemahaman beberapa orang guru mengenai KTSP.
2. Kemampuan guru dalam melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari silabus dan RPP yang dibuat sudah sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan beberapa orang guru mendapatkan diklat khusus KTSP dari LPMP. Walaupun ada kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan silabus dan RPP. Selain itu, di dalam pelaksanaan silabus dan RPP, guru sudah berusaha untuk menyesuaikan dengan yang direncanakan dalam silabus dan RPP.

3. Pemantauan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Yogyakarta masih rendah. Hal ini sebagai akibat kekurangpahaman Kepala Sekolah mengenai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kepala Sekolah tidak mendapatkan pendidikan dan latihan khusus mengenai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, selain itu Kepala Sekolah tidak ikut terlibat sebagai peserta dalam Bimtek yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Sehingga dalam pemantauan silabus dan RPP, dan pemantauan Program Belajar Belajar masih kurang.

Saran

Sebagai upaya untuk meningkatkan penelitian lebih lanjut, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Sosialisasi merupakan salah satu komponen penting yang tidak boleh ditinggalkan setiap menerapkan suatu program yang baru. Sebelum melakukan sosialisasi dituntut perencanaan matang sehingga tujuan yang diharapkan dengan sosialisasi suatu program yang baru dapat terlaksana.
2. Guru merupakan ujung tombak yang menentukan tingkat keberhasilan implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, sehingga guru dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuannya dengan mengikuti berbagai pendidikan latihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) maupun Dinas Pendidikan setempat ataupun saling bertukarpikir dengan guru lain yang berada dalam wadah Musyarawah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
3. Kepala Sekolah hendaknya meluangkan sedikit waktunya untuk memantau pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar dan melakukan supervisi terhadap guru. Kepala Sekolah hendaknya selalu meningkatkan pengetahuannya, mengingat peran Kepala Sekolah sebagai inovator yang memiliki berbagai strategi yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Depdiknas. (2002). *Kompetensi manajemen kurikulum*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Dirjen Dikdasmen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Karya Ilmu

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 (PP 19/2005) tentang
Standar Nasional Pendidikan: Bandung: CV Eko Jaya

Miles, M.B. & Huberman, M.A. (1984). *Qualitative data analysis*. California: SAGE
Publications, Inc.